

Surga yang Tak Terlindungi

Satu tahun setelah keputusan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan sebagian kegiatan penambangan nikel di Raja Ampat

GREENPEACE

Daftar Isi

3 Temuan utama

4 Raja Ampat tetap tidak terlindungi secara hukum

7 Cagar Biosfer UNESCO yang baru

9 Rencana penambangan nikel lebih lanjut

14 PT Gag Nikel – merusak ekosistem yang tak tergantikan namun tetap beroperasi

16 Rantai pasokan PT Gag Nikel

18 Pabrik peleburan nikel bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara

20 Ancaman lainnya – pertambangan minyak, gas, dan batu bara

23 Pemulihan kawasan yang sebelumnya rusak akibat pertambangan

25 Tuntutan

Temuan utama



► Pemandangan dari udara memperlihatkan sedimentasi dari bekas penambangan nikel PT Kawei Sejahtera Mining yang menyebabkan perubahan warna air laut di Pulau Kawe, Raja Ampat. 12/12/2025. © Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace

- Tiga izin pertambangan nikel sedang diproses, dengan rencana penambangan di bagian timur Waigeo, pulau terbesar di Raja Ampat.
- PT Gag Nikel terus beroperasi meskipun audit lingkungan telah mengidentifikasi kelemahan serius, termasuk sedimentasi pesisir yang tidak ditangani dan pengendalian erosi yang tidak memadai.
- PBB telah menetapkan Raja Ampat sebagai Cagar Biosfer UNESCO, namun peta-peta tersebut tidak mencakup zona inti di Pulau Kawe, serta kawasan-kawasan yang kini terancam oleh penambangan nikel.
- Wilayah-wilayah di Raja Ampat yang berada di dalam cagar biosfer dan batas-batas Geopark sebelumnya masih dipetakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai wilayah yang dapat diberikan izin untuk kegiatan pertambangan batu bara atau pertambangan lainnya.
- Paul Finsen Mayor, salah satu politisi lokal yang paling vokal menentang penambangan nikel, adalah komisaris PT Raja Ampat Nikel Abadi, sebuah perusahaan penambangan nikel yang berencana memulai operasinya di Waigeo Timur.
- PT Eka Kurnia Baru, salah satu perusahaan yang masih merencanakan penambangan nikel di Raja Ampat, telah berupaya mengaktifkan izin penambangan batu bara di Misool, sebuah pulau di selatan Raja Ampat.
- Nikel dari PT Gag dipasok ke kawasan industri di Teluk Weda, tempat nikel tersebut memasuki rantai pasokan domestik dan global.
- PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) disuplai oleh sekitar 4,5 GW listrik dari pembangkit listrik tenaga batu bara *captive*.
- Menurut para peneliti di Global Energy Monitor dan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), proyek-proyek batu bara yang sedang dikembangkan berarti bahwa total kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara *captive* Indonesia dapat mencapai lebih dari 31 GW, melampaui total kapasitas batu bara Australia saat ini sebesar 22,8 GW.



► Pemandangan udara Kepulauan Wayag, ikon Raja Ampat. Sejak Juni 2025, kawasan ini ditutup bagi wisatawan oleh sebagian masyarakat yang mendukung pertambangan. 12/12/25.
© Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace

Raja Ampat tetap tidak terlindungi secara hukum

Pada 10 Juni 2025, menyusul protes publik terkait penambangan nikel di Raja Ampat, Pemerintah Indonesia mengumumkan pembatalan segera 4 dari 5 izin penambangan nikel yang aktif di seluruh kepulauan.¹ Langkah ini merupakan langkah yang disambut baik, namun masih jauh dari cukup untuk memberikan perlindungan penuh bagi kawasan yang dikenal secara global sebagai 'surga terakhir' berkat pulau-pulau tropisnya serta keanekaragaman hayati laut dan daratnya.²

1 <https://setkab.go.id/en/govt-revokes-mining-permits-of-four-companies-affirms-commitment-to-preserving-conservation-areas/>
2 <https://edition.cnn.com/travel/article/raja-ampat-indonesia-cmd>

Dalam 14 bulan sejak saat itu, hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia akan melindungi Raja Ampat untuk generasi mendatang, terlepas dari pentingnya kawasan tersebut bagi keanekaragaman hayati global dan reputasinya sebagai destinasi wisata 'daftar impian' dunia. Ketegangan juga masih berlangsung di sekitar kawasan Wayag, di mana lokasi ikonik ini ditutup bagi wisatawan selama hampir sepanjang tahun lalu akibat protes dari sebagian masyarakat yang mendukung pertambangan.³ Komunitas adat dan lokal yang mendukung konservasi juga aktif, bersama dengan Institut USBA yang telah berupaya mengumpulkan komunitas adat untuk memperkuat suara mereka dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.⁴

Selama setahun terakhir, Raja Ampat semakin diakui secara internasional atas pentingnya kawasan ini, termasuk penetapannya sebagai Cagar Biosfer UNESCO.⁵ Namun, ada juga persiapan untuk penambangan nikel baru oleh tiga perusahaan di bagian timur Pulau Waigeo, dan PT Gag Nikel terus beroperasi meskipun terdapat kelemahan lingkungan yang teridentifikasi dalam audit resmi yang ditugaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.⁶



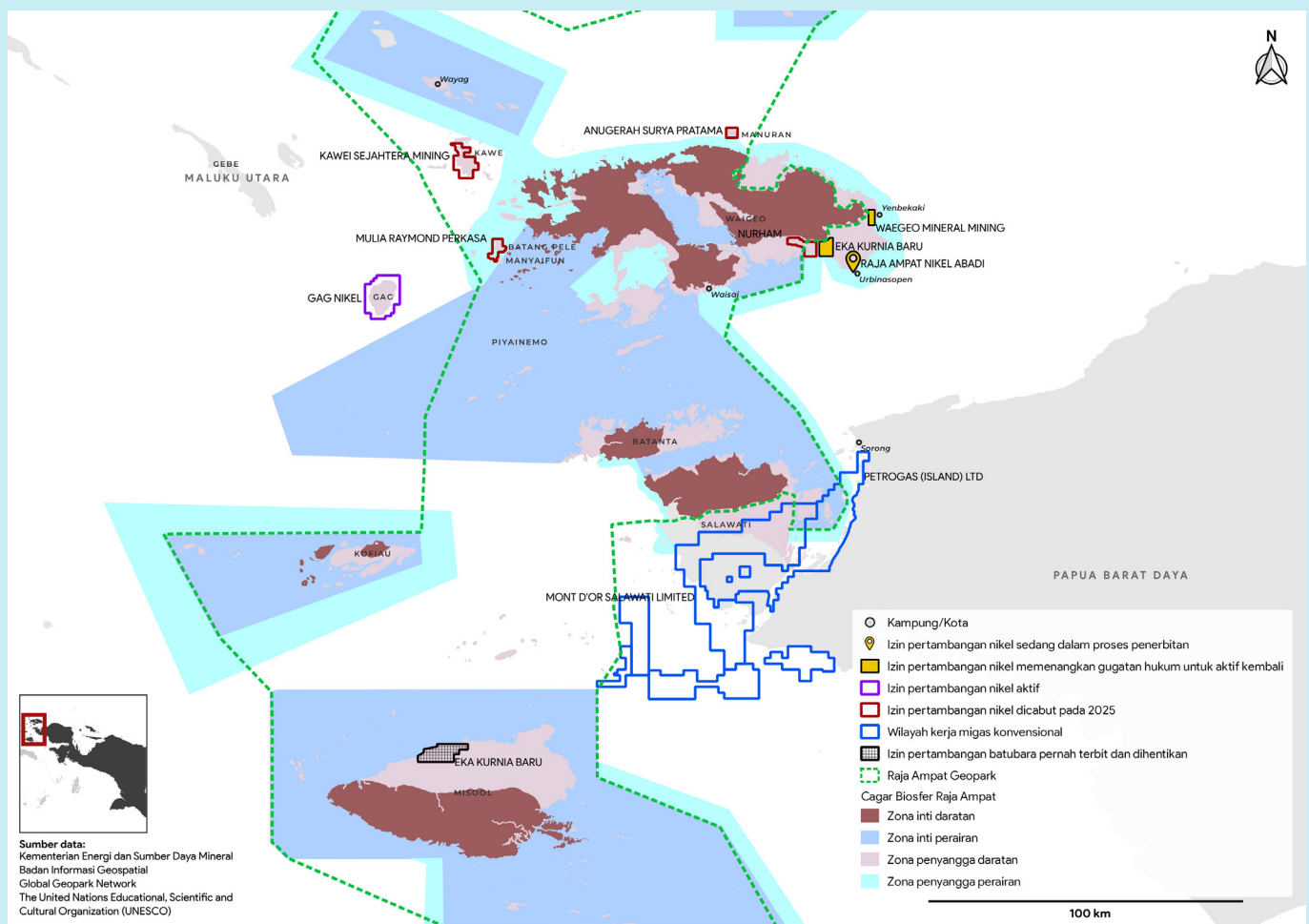
► Pemandangan udara Kampung Yenbekaki, Waigeo Timur, Raja Ampat. Kampung ini berada dekat dengan kawasan yang direncanakan menjadi lokasi baru penambangan nikel. 12/12/25. © Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace

3 Lihat misalnya <https://www.tempo.co/ekonomi/wayag-ditutup-sementara-kemenpar-jamin-wisata-raja-ampat-tetap-aman-1695707>. Penutupan hingga Juli 2026 dikonfirmasi oleh penelitian lapangan Greenpeace Indonesia.
4 <https://institutusba.org/profil/>
5 <https://www.unesco.org/en/articles/26-new-biosphere-reserves-unescos-continues-unprecedented-expansion-its-global-network>
6 <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/97629/hasil-audit-lingkungan-gag-nikel-ada-kekurangan-dijatuhi-denda>

Ancaman lain juga muncul. Sebuah perusahaan batu bara telah mengambil tindakan hukum untuk mencoba mengaktifkan kembali izin pertambangan yang belum dikembangkan di Pulau Misool,⁷ sementara dua perusahaan lain yang memproduksi minyak dan gas di dalam dan sekitar Pulau Salawati, di kawasan yang juga tumpang tindih dengan *geopark*/cagar biosfer.⁸

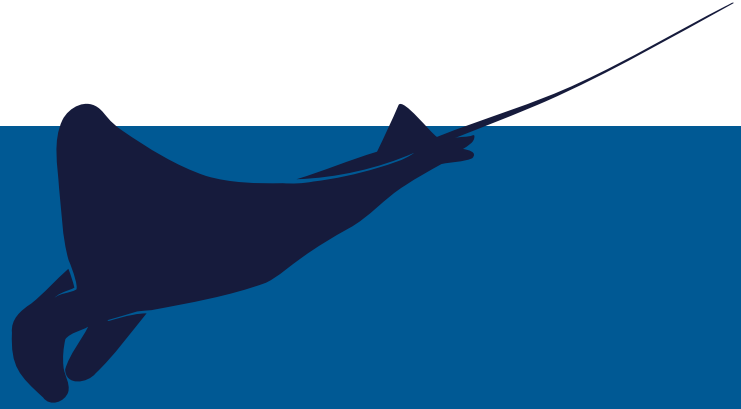
Sebuah studi tahun 2026 oleh Wildlife Conservation Society dan Universitas Queensland menemukan bahwa lebih dari 70% kawasan lindung laut di seluruh dunia terkontaminasi oleh limbah cair, dengan angka tersebut mencapai 90% di kawasan lindung pesisir Segitiga Karang.^{9,10} Penelitian dan pemantauan LSM lokal menunjukkan bahwa polusi limbah domestik dan sampah plastik telah menjadi ancaman serius bagi masa depan Raja Ampat.¹¹

Peta 1: Risiko bagi Raja Ampat dari pertambangan, minyak dan gas



7 PT Eka Kurnia Baru, sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor nikel dan batu bara. Kasus di Misool yang berkaitan dengan batu bara adalah
Perkara No. 357/G/TF/2023/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
8 Analisis pemetaan Greenpeace Juli 2026, lihat Peta 4.
9 <https://insideclimatenews.org/news/26042026/sewage-threatens-coral-reefs-marine-protected-areas/>
10 Gambaran umum tentang Segitiga Karang <https://www.adb.org/multimedia/coral-triangle/>
11 Lihat misalnya <https://oceanographicmagazine.com/features/cyanobacteria-in-raja-ampat/> dan karya organisasi seperti Restore Raja Ampat
<https://www.instagram.com/restore.rajaampat>

Cagar Biosfer UNESCO yang baru



Sebagian besar wilayah Kepulauan Raja Ampat, yang telah ditetapkan sebagai Geopark Global UNESCO,¹² menjadi Cagar Biosfer UNESCO pada September 2025.¹³ Secara teori, hal ini memberikan perlindungan tambahan, dengan zona inti yang merupakan “ekosistem yang dilindungi secara ketat dan didedikasikan untuk melestarikan keanekaragaman hayati habitat dan spesies” serta zona penyangga di darat dan laut “di mana kegiatan yang selaras dengan konservasi—seperti penelitian, pendidikan, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan—didorong.”¹⁴

Anehnya, batas-batas zona inti cagar biosfer tersebut berbeda dengan batas-batas Geopark UNESCO yang sudah ada di salah satu kawasan utama tempat penambangan nikel berlangsung hingga Juni 2025. Pulau Kawe, yang diidentifikasi oleh para ahli konservasi sebagai lokasi penting bagi ikan pari manta,¹⁵ sama sekali tidak dimasukkan ke dalam zona inti cagar biosfer, yang mengindikasikan bahwa lobi atas nama industri penambangan nikel mungkin telah mempengaruhi penetapan batas-batas peta.

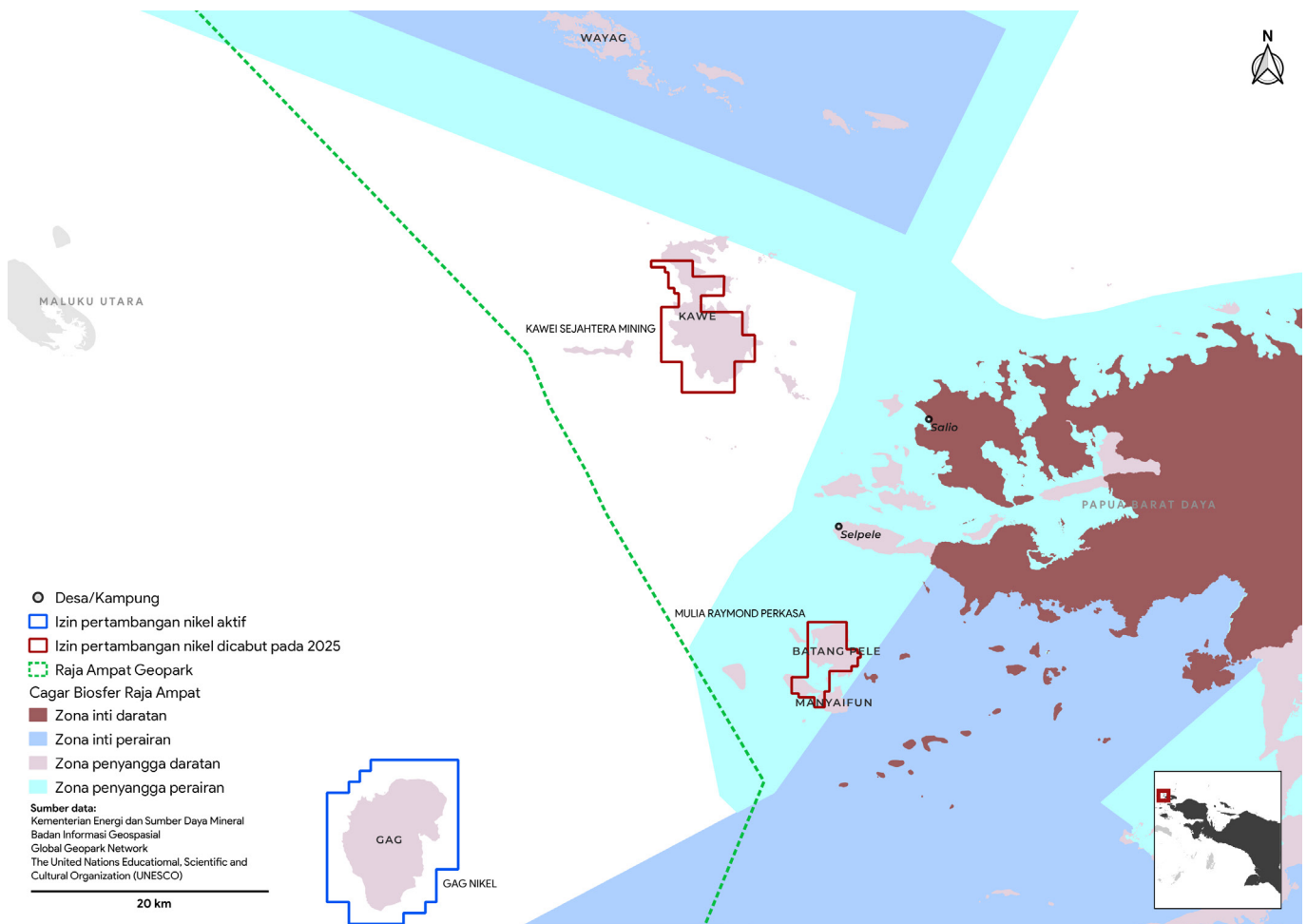
¹² <https://www.unesco.org/en/igpp/geoparks/raja-ampat>

¹³ <https://www.unesco.org/en/articles/26-new-biosphere-reserves-unescos-continues-unprecedented-expansion-its-global-network>

¹⁴ <https://www.unesco.org/en/mab/wnbr/about>

¹⁵ <https://www.conservation.org/press-releases/2024/04/09/new-research-in-raja-ampat-reveals-vital-insights-into-protecting-vulnerable-reef-manta-rays>

Peta 2: Pulau Kawe berada di dalam Geopark UNESCO tetapi di luar zona inti Cagar Biosfer. Pulau Kawe sebelumnya menjadi konsesi perusahaan tambang yang izinnnya telah dicabut di tahun 2025.



Seorang warga Manyafun, Raja Ampat sedang menebar jaring ikan di perairan dekat kampungnya 06/07/26.
© Alif R Noudy Korua/ Greenpeace





▼
Cenderawasih
botak
(*Diphyllodes
respublica*).
© Bernard Van
Elegem

Rencana penambangan nikel lebih lanjut

Waigeo adalah pulau terbesar di antara 1.500 pulau dan pulau-pulau kecil yang membentuk Kepulauan Raja Ampat, serta menjadi habitat spesies endemik langka seperti cendrawasih botak, kalkun semak Waigeo, serta marsupial seperti kuskus berbintik Waigeo.¹⁶

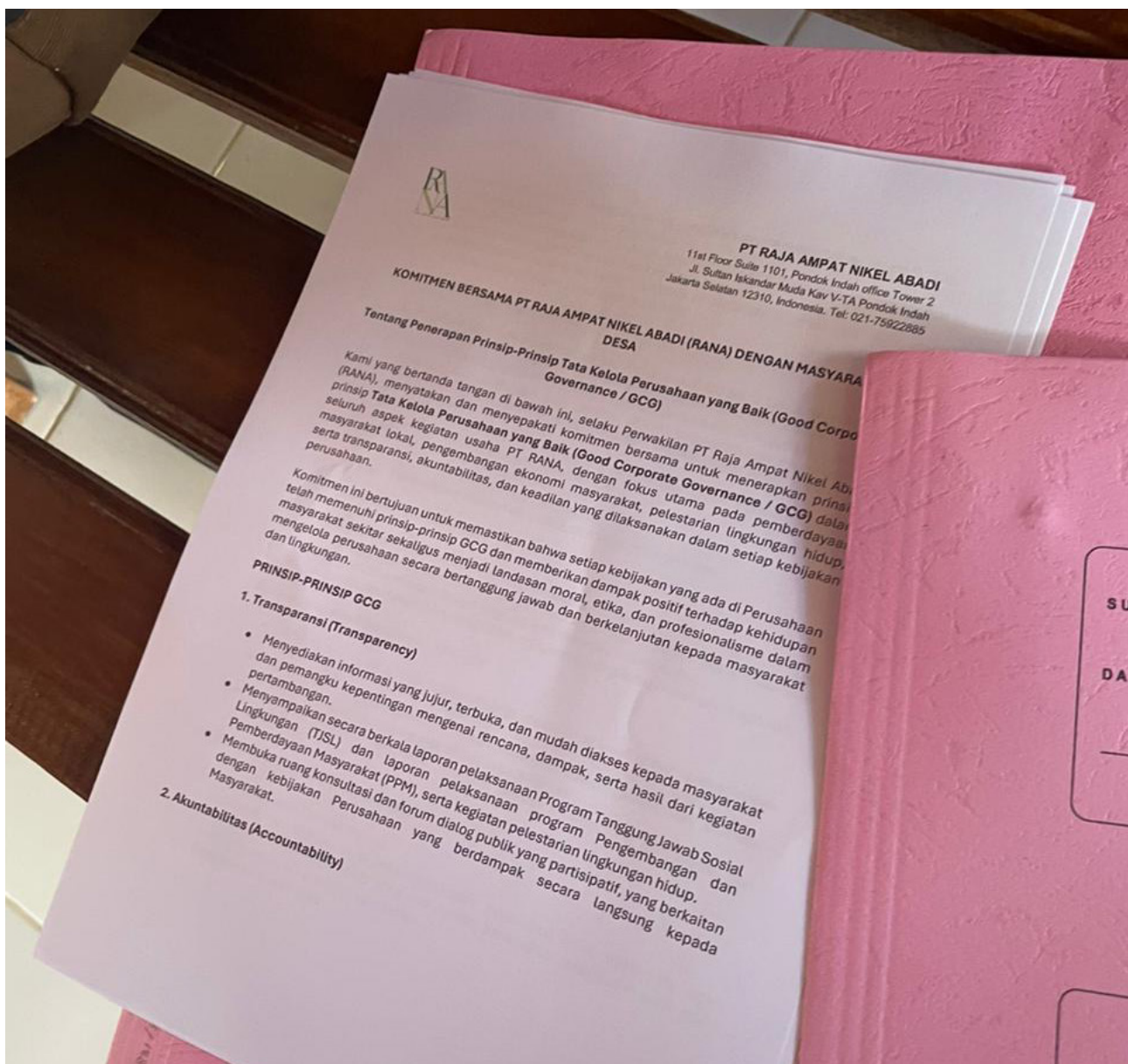
Ketiga operasi pertambangan nikel yang direncanakan berada di bagian timur Pulau Waigeo, tepatnya di dalam zona penyangga cagar biosfer. Hal ini menunjukkan bahwa kendati daerah-daerah tersebut dianjurkan untuk kegiatan yang selaras dengan upaya konservasi, kenyataan yang terjadi di Raja Ampat kemungkinan akan sangat berbeda.¹⁷

¹⁶ <https://www.fauna-flora.org/news/rhapsody-in-blue-spectacular-rare-orchid-found-during-surveys-in-west-papua/?utm>

¹⁷ Seluruh bagian timur Waigeo berada dalam zona penyangga cagar biosfer. Analisis pemetaan Greenpeace, Juli 2026. Lihat Peta 1.

PT Raja Ampat Nikel Abadi

PT RANA tampaknya merupakan perusahaan pertambangan nikel baru. Lokasi tepat konsesinya masih belum jelas. Beberapa bukti menunjukkan bahwa lokasi tersebut akan berada di dekat Kampung Urbinasopen, tempat perusahaan tersebut mengadakan diskusi sosialisasi pada tahun 2025,¹⁸ sementara informasi dari pemerintah tingkat provinsi menunjukkan bahwa lokasi tersebut akan berada di daerah dekat Kampung Yenbekaki.¹⁹



► Dokumen PT RANA yang diperlihatkan kepada masyarakat Kampung Urbinasopen dalam pertemuan sosialisasi sepanjang 2025.

¹⁸ Dikonfirmasi oleh investigasi lapangan Greenpeace Indonesia, Februari 2026. Informasi tambahan tersedia berdasarkan permintaan.

¹⁹ Tanggapan tanggal 16 Juli 2025 terhadap permintaan Keterbukaan Informasi Publik (FOI) Greenpeace Indonesia dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, salinannya tersimpan dalam arsip.

Pada pertemuan sosialisasi PT RANA di Urbinasopen, Paul Finsen Mayor, seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Barat Daya, turut hadir. Sebelumnya, ia dikenal sebagai kritikus vokal terhadap pertambangan nikel di Raja Ampat,²⁰ dan dalam wawancara tahun 2025 dengan Greenpeace Indonesia, ia menyatakan, “*Saya juga imbau kepada masyarakat Raja Ampat, dulu tanah-tanah itu tidak bermasalah, tapi datangnya tambang itu mulai bermasalah.*”²¹ Namun, dalam situasi ini ia tampaknya menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut dalam kapasitas yang berbeda – profil

perusahaan yang diperoleh Greenpeace Indonesia menegaskan bahwa ia adalah Komisaris PT RANA.²² Menanggapi pertanyaan dari Greenpeace Indonesia, Paul Finsen Mayor tidak membenarkan atau membantah bahwa dia adalah komisaris perusahaan tersebut, dengan menyatakan bahwa “*kalau ada yang mengatakan bahwa saya itu adalah komisaris dari PT itu, sampai sekarang saya belum dapat suratnya*”. Mengenai pertemuan di Urbinasopen, ia mengklaim “*Saya hanya menjadi fasilitator dan mediator sebagai pemimpin adat.*”²³

PT Waageo Mineral Mining

PT WMM adalah salah satu dari sejumlah perusahaan pertambangan nikel yang mengajukan gugatan hukum terhadap pembatalan izin pertambangan sebelumnya yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia.²⁴ Perusahaan tersebut memenangkan gugatan terhadap kementerian di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Juli 2023.²⁵ Meskipun perusahaan kini berhak mengajukan permohonan izin operasi, hingga saat ini mereka belum menerima izin operasi produksi dari kementerian.²⁶ Konsesi tersebut terletak dekat Kampung Yenbekaki di Waageo Timur dan juga dekat dengan lokasi pelepasan sejumlah spesies tukik penyu,²⁷ termasuk penyu belimbing, yang terdaftar sebagai ‘rentan’ oleh IUCN.²⁸

Pemegang saham terbesar di perusahaan ini adalah PT Bara Lestari Sinergi, dengan 70% dari total saham, yang dimiliki melalui PT Petro Indah Indonesia. Pemilik manfaatnya adalah Wong John Juadi, sementara Citra Hartono bertindak sebagai pemegang saham dan Maichiardshen sebagai direktur.²⁹

Wong John Juadi juga terkait dengan Bara Indah Sinergi Group (Grup BIS). Ia menjabat sebagai komisaris dan pemilik manfaat di beberapa anak perusahaan, termasuk perusahaan nikel PT Bhumi Karya Utama, PT Titan Agro Abadi di Sulawesi Tenggara, dan perusahaan pelayaran PT Agro Bahana Nusantara. Grup BIS memiliki dua perusahaan pertambangan lainnya di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara, serta bisnis di sektor lain, termasuk batu bara.³⁰

20 <https://www.tempo.co/wawancara/kepala-adat-raja-ampat-nikel-1845151>

21 Juni 2025 Wawancara dengan Paul Finsen Mayor. Kutipan muncul pada menit ke-6 detik ke-48 <https://www.youtube.com/watch?v=Yj32PMkDKiA>
Kutipan asli dalam bahasa Indonesia: “*Saya juga imbau kepada masyarakat Raja Ampat — dulu tanah-tanah itu tidak bermasalah, tapi datangnya tambang itu mulai bermasalah.*”

22 Informasi dari profil AHU Mai 2026, yang disimpan dalam arsip Greenpeace Indonesia dan tersedia atas permintaan. Diakses Mei 2026

23 20 Juli 2026, balasan Paul Finsen Mayor melalui rekaman suara atas surat permintaan tanggapan (*opportunity to comment*–OTC) yang dikirim oleh Greenpeace Indonesia.

24 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan proses peninjauan izin pada tahun 2015 yang telah menyebabkan pembatalan ratusan izin pertambangan perusahaan dan pemberlakuan berbagai persyaratan pada izin-izin lainnya yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar dapat memperoleh status ‘bersih dan jelas’ yang memungkinkan operasi mereka dimulai atau dilanjutkan.

25 Putusan PTUN Jakarta No. Perkara 218/G/TF/2023/PTUN.JKT https://sipp.ptun-jakarta.go.id/list_perkara/search

26 Surat tanggal 24 Juni 2026 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Greenpeace Indonesia. Tersedia atas permintaan.

27 <https://jubi.id/domberei/2025/800-ekor-tukik-penyu-dilepas-di-pantai-warebar-raja-ampat/>

28 <https://www.worldwildlife.org/species/sea-turtle/leatherback-turtle/>

29 Pemilik Manfaat - <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat> Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU)

30 Bara Indah Sinergi Group <https://bi-sinergi.com/>



▶ Pantai Warebar yang terletak di Kampung Yenbekaki, Distrik Waigeo Timur, Raja Ampat, merupakan lokasi penting bagi penyu belimbing dewasa untuk bertelur. 26/08/24. © Sumaryanto Bronto/Greenpeace



▶ Pemandangan Kampung Yenbekaki di Waigeo Timur, Raja Ampat, dari udara. Kampung ini berada dekat dengan kawasan yang direncanakan menjadi lokasi baru penambangan nikel. 12/12/25. © Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace

PT Eka Kurnia Baru

PT EKB adalah salah satu perusahaan lain yang mengajukan gugatan hukum terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Gugatan tersebut diajukan terkait dua konsesi di Raja Ampat: satu konsesi nikel di Waigeo Timur, dan satu konsesi batu bara di Pulau Misool.³¹ Perusahaan ini memenangkan gugatan terkait konsesi pertambangan nikel,³² namun kalah dalam gugatan terkait konsesi pertambangan batu bara.³³ Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa perusahaan tersebut telah menerima izin operasi produksi nikel dari kementerian.

Pemilik manfaat PT EKB adalah Ibrahim Pokko,³⁴ yang telah lama terlibat dalam dunia politik di Sorong dan Papua Barat Daya. Ia pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Sorong³⁵ dan pada tahun 2024 mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Gelora.³⁶

► Pemandangan udara menunjukkan kawasan hutan di dalam wilayah konsesi nikel PT Eka Kurnia Baru di Urbinasopen, Waigeo Timur, Raja Ampat. 12/12/25. © Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace



31 Greenpeace Indonesia menemukan data yang tidak konsisten mengenai lokasi konsesi, termasuk dari Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), namun konsesi tersebut dipetakan berlokasi di Pulau Misool oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
32 Putusan No. 349/G/TF/2023/PTUN.JKT, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, 26 Oktober 2023, dikuatkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, 31 Januari 2024.
33 Putusan No. 357/G/TF/2023/PTUN.JKT, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, 26 Oktober 2023
34 Pemilik Manfaat - <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat> Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU)
35 Lihat halaman 248 https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_14%20PHPU%202012%20KAB%20SORONG-TELAH%20BACA%20-%202025-04-2012.pdf
36 jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L5.38PBD.pdf



▼
Menteri Bahlil saat berkunjung ke Pulau Gag, Raja Ampat. 7 Juni 2025.
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pantau-sumur-migas-di-sorong-menteri-bahlil-sempatkan-kunjungi-pulau-gag>

PT Gag Nickel – merusak ekosistem yang tak tergantikan namun tetap beroperasi

Selama kontroversi tahun 2025 mengenai penambangan nikel di Raja Ampat, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia mengirimkan inspektur lingkungan untuk mengunjungi semua perusahaan yang saat itu aktif menambang di sana. Dalam siaran pers tanggal 5 Juni, kementerian tersebut menyatakan bahwa operasi penambangan di Pulau Gag “bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.³⁷ Proses evaluasi diumumkan, dan Menteri Lingkungan Hidup saat itu, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa kementerian “tidak akan ragu mencabut izin jika terbukti merusak ekosistem yang tak tergantikan.”³⁸

Beberapa hari kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengumumkan penangguhan sementara izin PT Gag. Ia dan tim kementerian kemudian mengunjungi lokasi operasi PT Gag di tengah gencarnya sorotan media, dan kemudian menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti sedimentasi atau pelanggaran lingkungan, serta menyiratkan bahwa gambar-gambar pencemaran di PT Gag hanyalah *hoaks*.³⁹

³⁷ <https://kemenlh.go.id/news/detail/aktivitas-tambang-ancam-ekosistem-raja-ampat-klhbplh-turun-tangan>. Rincian lebih lanjut mengenai pembatasan pertambangan di pulau-pulau kecil tersedia dalam laporan Greenpeace Indonesia berjudul ‘Paradise Lost’ <https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/67016/paradise-lost/>

³⁸ Ibid.

³⁹ Lihat misalnya <https://www.antaranews.com/berita/4888449/bahlil-minta-bijak-kondisi-raja-ampat-yang-dituding-tercemar-di-medsos>



► Pemandangan udara dari PT Gag Nickel yang terletak di Pulau Gag, Raja Ampat. 07/05/25. © Alif R Noudy Korua/Greenpeace

Audit lingkungan yang diperintahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dilaksanakan pada paruh kedua tahun 2025, setelah PT Gag kembali beroperasi pada September 2025.⁴⁰ Hasil temuan audit tersebut disinggung dalam wawancara singkat media dengan Menteri Lingkungan Hidup pada 26 Januari 2026, di mana ia menyatakan “Audit Gag Nickel sudah kami terima, jadi ada beberapa kekurangan, yang kemudian kami kenakan denda.”⁴¹ Greenpeace Indonesia memperoleh salinan surat tindak lanjut hasil audit PT Gag Nickel tertanggal 2 Februari 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui permohonan informasi, di mana surat tersebut menunjukkan sejauh mana pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Di antara 24 masalah utama yang diidentifikasi dalam audit tersebut adalah:

- Pengendalian sedimentasi, limpasan, dan erosi belum optimal.
- Risiko yang terus berlanjut terkait peningkatan beban sedimen ke lingkungan pesisir dan laut, terutama selama hujan lebat.
- Risiko luapan air tambang selama hujan ekstrem, yang belum diatasi.

- Tidak adanya pendekatan sistem tertutup dalam pengelolaan air limbah.
- Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan keanekaragaman hayati saat penambangan.
- Potensi risiko hidrogeologis dan hidrologis yang mengancam sumber daya air di pulau kecil.

Surat tersebut memberi PT Gag waktu tiga bulan untuk menyerahkan persetujuan lingkungan yang telah diperbaharui dan mencakup bagaimana mereka menanggapi masalah tersebut. Batas waktu ini telah dipenuhi oleh PT Gag.⁴² Surat Kementerian tersebut tidak menyebutkan adanya denda yang dijatuhkan.⁴³ PT Gag tidak merespons surat permohonan informasi Greenpeace Indonesia terkait status implementasi hasil audit. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mengklaim tidak menemukan bukti sedimentasi atau kegagalan lingkungan, belum memberikan komentar publik mengenai temuan ini.

40 <https://www.antaranews.com/berita/5109933/esdm-sebut-operasional-gag-nikel-untuk-audit-lingkungan>

41 Kutipan asli dalam bahasa Indonesia: “Audit Gag Nickel sudah kami terima, jadi ada beberapa kekurangan, yang kemudian kami kenakan denda”.

42 13 Juli 2026 Tanggapan Kementerian Lingkungan Hidup atas permohonan Keterbukaan Informasi Publik (FOI), disimpan dalam arsip oleh Greenpeace Indonesia.

43 Surat Kementerian Lingkungan Hidup nomor B.46/E/PCA.6.1/02/2026, 3 Februari 2026. Tersedia berdasarkan permintaan.



Bijih nikel sedang dimuat ke dalam tongkang di PT Gag, Raja Ampat. 12/04/2025.

© Wendy Mitchell/
Greenpeace

Rantai pasokan PT Gag Nikel

Bijih nikel dari PT Gag Nikel diolah di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Pulau Halmahera, Maluku Utara, sebelum memasuki rantai pasokan untuk produk-produk seperti baja tahan karat dan komponen baterai untuk kendaraan listrik. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa lebih dari 650 pengiriman dari Pulau Gag ke Weda Bay antara Januari 2023 dan Juli 2026 dengan sebagian besar bijih diterima di dermaga PT Yashi Indonesia Investment, PT Skybrightness Metal Industry, dan PT Lipe Metal Industry.⁴⁴ Keterbukaan informasi dari perusahaan induk PT Gag Nikel, PT Antam, menunjukkan bahwa sebagian bijih nikelnya diolah oleh PT Universal Metals Investment (UMI).⁴⁵ Penelitian tambahan mengonfirmasi bahwa PT UMI dimiliki oleh grup Tsingshan.⁴⁶

44 Analisis Greenpeace Indonesia dari data Kementerian Perhubungan [monitoring-inaportnet.dephub.go.id](https://www.gem.wiki/Weda_Bay_power_station). PT Yashi Indonesia merupakan salah satu perusahaan peleburan utama di IWIP https://www.gem.wiki/Weda_Bay_power_station

45 Lihat catatan 22, halaman 94: https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202604/20260428113901-61689-0/FS%20ANTAM%2031%20Maret%202026%20-%20Final.pdf

46 Catatan perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa PT UMI dimiliki oleh Ever Rising Limited dan T&J Industrial Holding Limited. T&J adalah perusahaan yang bermarkas di Hong Kong, yang merupakan anak perusahaan dari Tsingshan Holding Group. <https://www.idnfinancials.com/archive/id/news/41127/TPMA-and-Tsingshan-joined-forces-to-form-a-nickel-transport-company>

Tsinghsan merupakan salah satu pemegang saham utama di IWIP⁴⁷ dan juga telah mendirikan perusahaan patungan, Youshan Nickel Indonesia, bersama Grup Huayou.⁴⁸ Youshan Nickel memproduksi komponen baterai untuk kendaraan listrik di Indonesia. PT Huayou juga memasok nikel ke rantai pasokan baterai yang, menurut penelitian tahun 2025, terkait dengan sejumlah produsen kendaraan listrik besar termasuk Toyota,⁴⁹ Honda,^{50,51} Nissan,⁵² Hyundai, BMW, Mercedes, Tesla dan BYD.^{53,54,55} Oleh karena itu, ada kemungkinan

bahwa rantai pasokan kendaraan mana pun dari perusahaan-perusahaan tersebut terkait dengan bijih nikel yang berasal dari PT Gag, meskipun kurangnya transparansi rantai pasokan membuat hal ini tidak dapat dikonfirmasi untuk saat ini. Para produsen mobil yang telah menanggapi pertanyaan dari LSM dan jurnalis menyatakan bahwa pengadaan nikel dan mineral penting lainnya diserahkan kepada pemasok baterai yang diharapkan untuk mematuhi kebijakan perusahaan.⁵⁶



► Pemandangan udara menunjukkan polusi udara di kawasan pabrik PT IWIP, Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara. 13/08/24. © Mas Agung Wilis Yudha Baskoro/Greenpeace

47 <https://www.etsingshan.com/Col/Col72/Index.aspx>

48 <https://iwip.co.id/en/youshan-nickel-indonesia-company/>

49 Bloomberg Terminal, diakses pada Mei 2025

50 <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-03-16/1219313047.PDF>

51 <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-catl-provide-ev-batteries-honda-starting-2024-2022-12-08/>

52 Bloomberg Terminal, diakses pada Mei 2025

53 Laporan yang belum dipublikasikan yang disimpan oleh Greenpeace yang memperbarui informasi yang sebelumnya tersedia untuk umum yang mengaitkan rantai pasokan nikel dengan produsen kendaraan listrik. Studi sebelumnya yang menunjukkan potensi keterkaitan rantai pasokan ini termasuk halaman 24, 'From Forests to EVs. Mighty Earth' <https://mightyeearth.org/wp-content/uploads/2024/05/FromForestsToEVs.pdf> dan halaman 89–91, 'Nickel Unearthed' Climate Rights international https://cri.org/wp-content/uploads/2024/01/NICKEL_UNEARTHED.pdf

54 Bloomberg Terminal, diakses pada Mei 2025

55 Huayou telah memperkenalkan perusahaan/merek sebagai pelanggan utamanya, <https://huayouindonesia.com/en/global/>

56 Lihat misalnya <https://cri.org/electric-vehicle-companies-failing-on-rights-and-environmental-practices/> and <https://www.eco-business.com/news/traceability-gap-ev-brands-cannot-confirm-if-nickel-supply-is-sourced-from-biodiversity-hotspot-raja-ampat/>

Pabrik peleburan nikel bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara

Pabrik peleburan nikel di Indonesia sebagian besar ditenagai oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dari pembakaran batu bara, yang dibangun khusus untuk melayani lokasi-lokasi seperti di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan IWIP. Pembangkit listrik batu bara *captive* ini dan pabrik peleburan nikel yang mereka tenagai merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca, polusi lokal, dan dampak kesehatan bagi masyarakat setempat.⁵⁷

Selama setahun terakhir, tidak ada tanda-tanda adanya upaya politik nasional untuk mengatasi dampak iklim atau kesehatan yang terkait dengan industri hilir nikel di Indonesia. Pembangkit listrik batu bara *captive* baru terus beroperasi, termasuk di Teluk Weda. Menurut analisis yang dilakukan oleh Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor (GEM), total kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara *captive off-grid* industri sebesar 4,49 gigawatt (GW). Kapasitas ini ditambahkan antara pertengahan 2024 dan pertengahan 2025, dengan sebagian besar kapasitas tersebut berada di pusat-pusat industri nikel di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.⁵⁸

57 Lihat misalnya <https://cri.org/reports/does-anyone-care/>

58 <https://energyandcleanair.org/publication/31-gw-of-captive-coal-is-jeopardizing-indonesias-economic-and-emissions-goals/>

Dari proyek-proyek yang sedang dikembangkan, total kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara *captive* Indonesia dapat mencapai lebih dari 31 GW, tiga kali lipat dari total kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara *captive* yang sudah ada pada tahun 2023. Angka ini melampaui total kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara Australia saat ini sebesar 22,8 GW.⁵⁹ Kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara *captive* yang saat ini memasok IWIP, menurut GEM, adalah 4,54 GW, lebih dari empat kali lipat kapasitasnya pada tahun 2021 sebesar 1 GW.⁶⁰ Sebagai perbandingan, IWIP saat ini memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara *captive* (4,54 GW) yang lebih besar daripada seluruh

kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara nasional Chile saat ini (sekitar 3,5 GW pada tahun 2025).⁶¹ Namun, setelah memperluas pasokan listrik tenaga batu baranya dengan cepat, pada November 2025, IWIP mengumumkan rencana investasi sebesar USD \$2 miliar yang dirancang untuk menambah 2 GW kapasitas energi terbarukan, di samping kapasitas batu bara yang sudah ada.⁶²



► Polusi udara di kawasan pertambangan IWIP (Weda Bay Industrial Park): Ancaman terhadap kesehatan dan lonjakan kasus penyakit pernapasan. 12/08/24. © Mas Agung Willis Yudha Baskoro/Greenpeace

59 ibid

60 Global Energy Monitor, "Pembangkit Listrik Teluk Weda," GEM Wiki — https://www.gem.wiki/Weda_Bay_power_station

61 International Trade Administration (trade.gov), "Chile Energy," mengutip data CEN per Mei 2025 <https://www.trade.gov/market-intelligence/chile-energy>

62 <https://ptiwp.com/2025/11/15/iwip-percepat-transisi-energi-hijaulewat-pemanfaatan-energi-baru-dan-terbarukan/index.html>

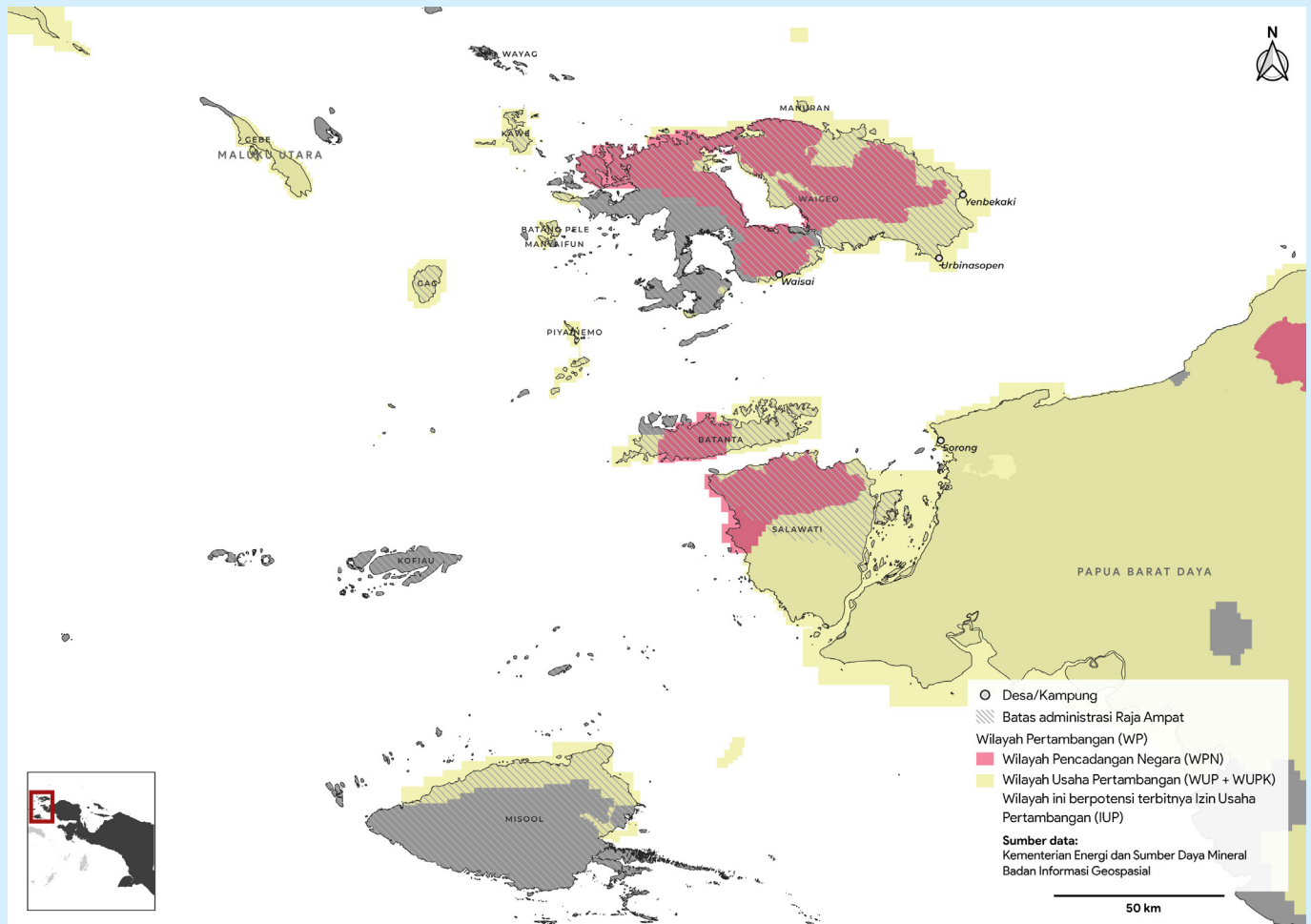
Ancaman lainnya – pertambangan minyak, gas, dan batu bara



Masalah penambangan nikel di Raja Ampat telah menjadi sorotan utama selama setahun terakhir, namun ada ancaman industri lain yang juga dihadapi oleh kepulauan ini. Meskipun PT EKB kalah dalam gugatan pengadilan untuk mengaktifkan kembali izin tambang batu bara di Pulau Misool, wilayah ini dan bagian lain dari Raja Ampat yang tumpang tindih dengan Cagar Biosfer dan Geopark masih diklasifikasikan sebagai ‘Wilayah Pertambangan.’ Klasifikasi ini, yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa kawasan-kawasan tersebut masih berpotensi mendapatkan izin penambangan batu bara atau izin penambangan lainnya.⁶³

63 Lihat Peta 3 untuk semua wilayah di Raja Ampat yang dipetakan sebagai ‘Wilayah Pertambangan’ oleh Kementerian ESDM.

Peta 3: 'Wilayah Pertambangan' di seluruh Raja Ampat

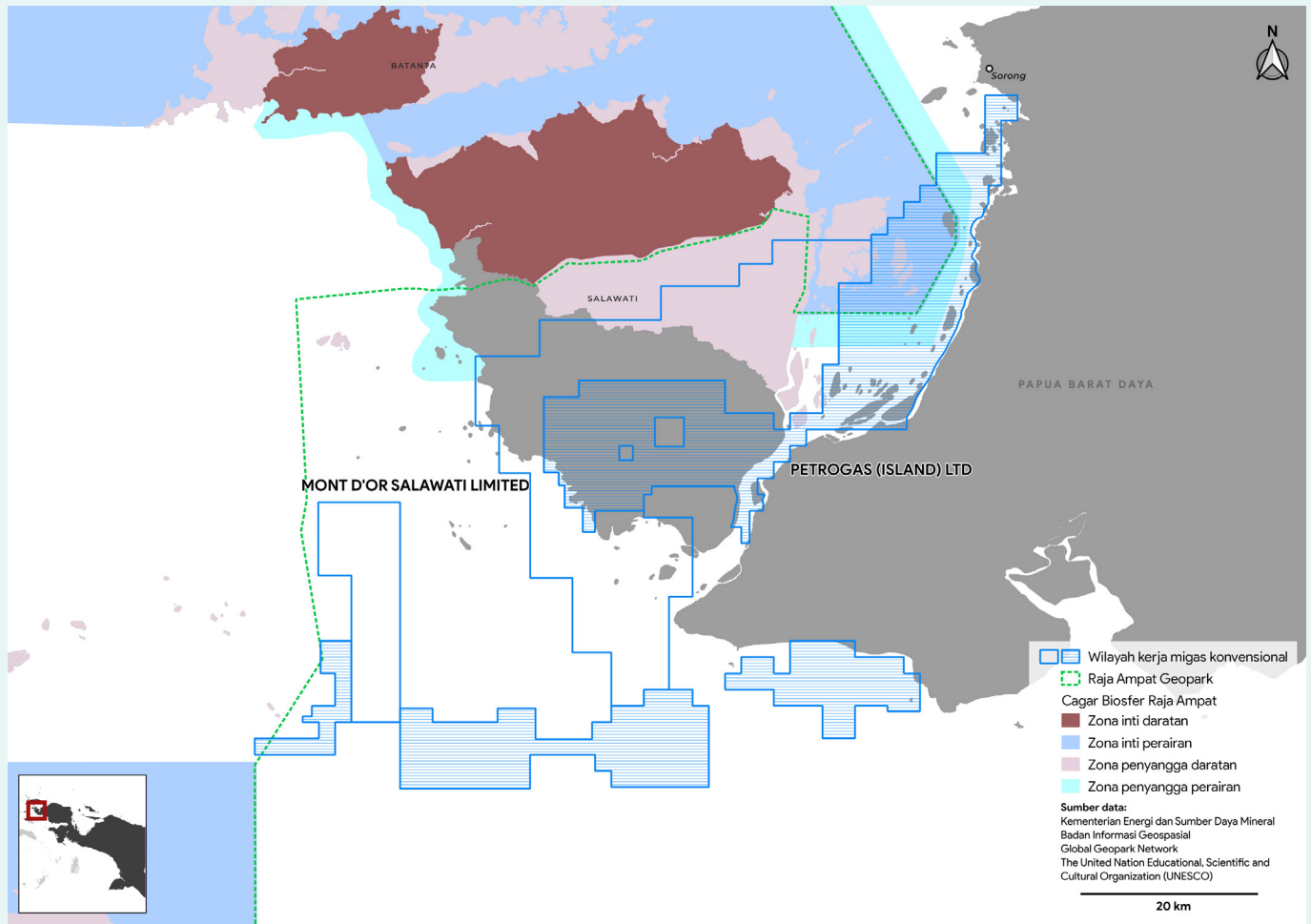


Sementara itu, operator minyak dan gas telah membangun pijakan mereka di beberapa bagian Raja Ampat. Di Pulau Salawati dan sekitarnya terdapat dua perusahaan yang terlibat dalam eksplorasi, pengembangan, dan produksi hulu minyak dan gas, yaitu Mont D'or Salawati Ltd yang dimiliki oleh perusahaan Kanada Criterium Energy⁶⁴ dan Petrogas Ltd, sebuah perusahaan asal Malaysia⁶⁵. Kedua perusahaan tersebut memiliki konsesi yang mencakup wilayah darat dan laut, dengan wilayah daratnya sebagian tumpang tindih dengan zona penyangga cagar biosfer.

64 <https://www.energy-pedia.com/news/indonesia/criterium-energy-announces-transformative-acquisition-of-mont-dor-petroleum-and-cusd22-million-public-offering-191826> dan <https://stockanalysis.com/quote/ttsxv/CEQ/company/>

65 <https://rhpetrogas.listedcompany.com/shareholdings.html> dan <https://www.forbes.com/profile/tiong-hiew-king/>

Peta 4: Tumpang tindih antara konsesi minyak dan gas dengan zona penyangga & zona inti Cagar Biosfer



Seorang warga setempat mendayung perahu, hamparan terumbu karang dan hutan mangrove tampak jelas di sepanjang pesisir Pulau Yangeffo, Raja Ampat. 11/04/2025. © Wendy Mitchell/ Greenpeace





▼
Pemandangan udara memperlihatkan bekas wilayah konsesi PT Anugerah Surya Pratama di Pulau Manuran, Raja Ampat. Tidak ada bukti adanya reklamasi. 12/12/25.
© Jurnasyanto Sukarno/ Greenpeace

Pemulihan kawasan yang sebelumnya rusak akibat pertambangan

Menurut peraturan Indonesia, perusahaan pertambangan memiliki kewajiban reklamasi dan rehabilitasi selama masa operasi pertambangan dan setelah pertambangan berakhir.⁶⁶ Namun, terdapat bukti yang luas menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tambang tidak mematuhi kewajiban tersebut.⁶⁷ Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengambil beberapa tindakan penegakan hukum, namun hal ini berfokus pada penangguhan izin hingga pembayaran 'dana jaminan' perusahaan ke pemerintah yang dirancang untuk menutupi biaya pemulihan jika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya.⁶⁸ Terkait reklamasi di lapangan, sedikit bukti mengenai pemulihan sistematis yang sudah dilakukan oleh perusahaan⁶⁹ atau melalui jaminan reklamasi, yang setidaknya dalam beberapa kasus telah mendistribusikan dana tanpa bukti bahwa pemulihan telah dilakukan.⁷⁰

66 Kewajiban-kewajiban ini diatur dalam PP 78/2010 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang), sebagaimana ditambah dengan Kepmen ESDM 1827/2018, Permen ESDM 26/2018 tentang dana jaminan dan penegakan hukum, serta Kepmen ESDM 344/2025. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

67 Lihat misalnya <https://www.eco-business.com/news/grim-toll-from-indonesias-abandoned-mines-may-get-even-worse-report/> dan <https://news.mongabay.com/2025/07/indonesian-civil-society-urges-probe-after-payout-for-mine-recovery-that-never-happened/>

68 <https://www.tempo.co/ekonomi/esdm-tangguhkan-190-iup-karena-tak-bayar-jaminan-reklamasi-2073329>

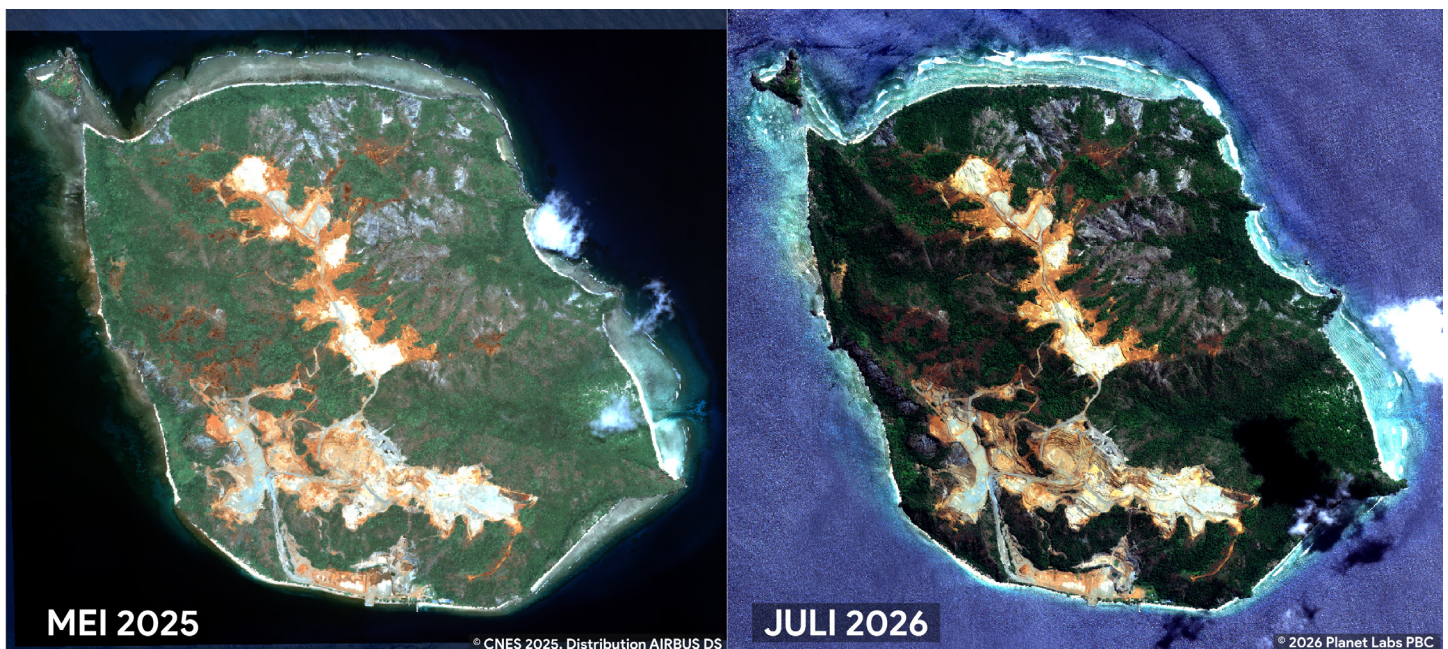
69 Lihat misalnya <https://jatam.org/id/lengkap/ditengah-pembahasan-konferensi-iklim-cop-26-jatuh-lagi-korban-lubang-tambang-ke-40>

70 <https://news.mongabay.com/2025/07/indonesian-civil-society-urges-probe-after-payout-for-mine-recovery-that-never-happened/>

Dalam kasus Raja Ampat, dari empat perusahaan yang izinnya dicabut pada tahun 2025⁷¹, dua di antaranya sebelumnya telah menambang nikel dan oleh karena itu wajib melakukan reklamasi di area yang pernah ditambang: PT Kawei Sejahtera Mining, yang beroperasi di Pulau Kawe, dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP), yang beroperasi di Pulau Manuran. Berdasarkan undang-undang, kedua perusahaan tersebut harus tetap bertanggung jawab atas reklamasi, bahkan setelah izin mereka dicabut.⁷² Hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda

kegiatan pemulihan yang dilakukan oleh PT ASP di Pulau Manuran,⁷³ sementara di Pulau Kawe, analisis satelit menunjukkan perubahan di area yang sebelumnya ditambang, yang mengindikasikan mungkin telah terjadi revegetasi. Greenpeace Indonesia mendesak Pemerintah untuk mempublikasikan hasil penilaiannya terhadap upaya pemulihan yang dilakukan oleh semua perusahaan di Raja Ampat dan untuk menegakkan peraturan pemulihan secara ketat.

Peta 5: Perbandingan citra satelit dari Mei 2025 dan Juli 2026 menunjukkan tidak ada restorasi di Pulau Manuran oleh PT ASP



⁷¹ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-cabut-empat-izin-perusahaan-tambang-di-raja-ampat>

⁷² UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 87-88 [https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)

⁷³ Analisis pemetaan Greenpeace Indonesia, Juli 2026

Tuntutan

1. **Perlindungan Penuh bagi Raja Ampat.**

Greenpeace Indonesia mendesak agar Raja Ampat dilindungi sepenuhnya dari aktivitas industri ekstraktif serta penegakan undang-undang yang ada yang seharusnya melindungi pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi di darat maupun di laut.

2. **Tidak Ada Penambangan di ‘Kawasan Terlarang’.**

Greenpeace International, Rainforest Foundation Norway, Fern, dan Mighty Earth telah menyusun peta Kawasan Terlarang Global yang mengidentifikasi kawasan-kawasan yang harus dilarang untuk penambangan karena signifikansi lingkungan, ekologi, budaya, dan/atau sosialnya yang kritis, atau karena tidak adanya atau penarikan prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dari Masyarakat Adat atau komunitas lokal yang bersangkutan. Peta ini akan digunakan sebagai dasar advokasi untuk melindungi kawasan-kawasan tersebut dari kegiatan pertambangan.⁷⁴

3. **Uji Tuntas Rantai Pasokan.**

Para pelaku rantai pasokan, termasuk produsen baterai, harus menyelidiki rantai pasokan mereka dan secara jelas serta terbuka menolak pasokan nikel yang berasal dari tambang mana pun di Raja Ampat atau dari kawasan terlarang lainnya pada peta ‘Kawasan Terlarang’.

4. **Perusahaan Pertambangan Harus Transparan dan Mencegah Dampak Negatif terhadap Lingkungan dan Sosial.**

Perusahaan pertambangan dan pengolahan bijih harus bertindak secara bertanggung jawab serta mematuhi semua undang-undang lokal, nasional, dan internasional, mencegah kerusakan lingkungan, serta transparan mengenai operasi, keuangan, kepemilikan manfaat, uji tuntas hak asasi manusia dan sosial, serta aktivitas rantai pasokan mereka. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk mencegah dampak merugikan dari penambangan nikel di Indonesia.

5. **Mengurangi Permintaan Nikel.**

Greenpeace percaya pada pendekatan holistik dan komprehensif terhadap pengadaan dan penggunaan mineral seperti nikel. Permintaan nikel hasil penambangan dapat dikurangi melalui peningkatan efisiensi dan penggunaan bahan pengganti, sementara strategi ekonomi sirkular—seperti daur ulang dan penggunaan kembali—sering kali dapat menjadi alternatif yang layak bagi pasokan nikel yang baru ditambang. Laporan berjudul “[Beyond Extraction: Pathways for a 1.5°C-aligned Energy Transition with Less Minerals](#)”, yang disusun oleh University of Technology Sydney atas permintaan Greenpeace International, menyoroti jalur yang kredibel menuju kecukupan dan efisiensi mineral yang dapat mengurangi permintaan nikel.⁷⁵

⁷⁴ Lihat <https://restrictedareasfrommining.org/> Sebuah ringkasan diskusi yang menegaskan perlunya Kawasan Terlarang telah didukung oleh 36 LSM.

⁷⁵ <https://www.greenpeace.org/international/publication/82073/beyond-extraction-pathways-for-a-1-5c-aligned-energy-transition-with-less-minerals?>



► Penyelam Greenpeace membentangkan spanduk bertuliskan "Tambang Nikel Membunuh Terumbu Karang" di Raja Ampat. 03/05/25. © Greenpeace